

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku:

- A. Salikin, Karwan, 2003, *Sistem Pertanian Berkelanjutan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ani Sri Rahayu, 2017, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, CV. Gramedia. Jakarta.
- D. Rianto Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Eka Fitriyaningsih, 2017, *Tinjauan terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Non Pertanian (Permukiman)*. Universitas Hasanudin, Makassar.
- G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, et. al, 2005, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Harini, Rini Dkk. 2012. *Agricultural Land Conversion: Determinants And Impact For Food Sufficiency In Sleman Regency*. Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Herman Soesangobeng, 2002, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam*, STPN, Yogyakarta.
- Irawan B. 2005. *Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatan dan Faktor Determinan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Joyo Winoto, 2005. *Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian dan Implementasinya*. Makalah Seminar "Penanganan Konversi Tanah dan Pencapaian Tanah Pertanian Abadi", 13 Desember 2005. Kerjasama Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (Institut Pertanian Bogor).
- Laeli Nurhamidah, Djauhari, 2017. *Pengalih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Di Kabupaten Tegal*. Jurnal Akta. Vol. 4 No. 4. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/viewFile/2513/1876>.
- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Makassar.
- Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Iqbal dan Sumaryanto, 2007, *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat*, Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 no. 2, Juni.

Novitadinaryanti, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Daerah Sepanjang Irigasi*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Pramusintha Nugraha, Budi Mulyanto, Khursatul Munibah, 2021. Peran Administrasi Pertanahan dalam Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Pertanian Lahan Basah Kabupaten Bogor, *Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*. DOI: <http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.1>.

Rianto Nugroho D, 2000, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

Salikin Karwan, 2003, *Sistem Pertanian Berkelanjutan*, Kanisius. Yogyakarta.

Smith Adam dan Guritno Mangkoesbroto, 2000, *Fungsi dan Peran Pemerintah dalam Perekonomian*, Rineka Cipta, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Gramedia Persada, Jakarta.

Sri Susyanti Nur, 2014, *Bank Tanah-Alternatif Penyelesaian Masalah Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan*, Pustaka Ilmu, Jakarta.

Sudargo Gautama, 2000, *Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.

Tati Nurmala (dkk), 2012, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

II. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Tanah Pertanian Pangan Berkelanjutan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Pemerintah Daerah.